LAMPIRAN

Data no: 1 (2 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Akses Vaksin Covid-19 yang Berkeadilan	Judul	-
2.	"Beberapa bulan terakhir ini, pemerintah mengupayakan herd immunity melalui vaksinasi. Tetapi, jumlah vaksin yang tersedia sangat terbatas. Sampai akhir Juli, jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksin tahap kedua masih sebesar 18,3 juta jiwa (target 208,218 juta jiwa). Itu berarti belum sampai 9 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan vaksin masih sangat tinggi dan harus berebut dengan negara-negara lainnya…"	Pengenalan isu	1-3
3.	"Hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) adalah Perjanjian Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS). Perjanjian ini sangat berpengaruh dan komprehensif, merupakan bagian dari perjanjian WTO hasil putaran Uruguay, 1994. Pasal 27-nya memberikan legal basis perlindungan paten di bidang farmasi, termasuk obat-obatan dan vaksin…"	Argumentasi	4
4.	Vaksin Astra Zeneca yang diikhlaskan hak patennya oleh Sarah Gilbert, sang inventor, juga masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh negara karena tidak semua negara mempunyai manufacturing capacity untuk memproduksinya. Jika untuk obat-obatan HIV dan hepatitis B, penggunaan paten oleh pemerintah bisa diimplementasikan, maka terhadap penyakit yang merupakan	Penegasan	13-14

	pandemi seperti Covid-19 ini, tentunya fleksibilitas tersebut harus dimanfaatkan untuk membangun herd immunity di Indonesia. Semangat dari pemerintah untuk memperjuangkan itu sangat diperlukan. Mengingat perjuangan mendapatkan TRIPS waiver pada forum internasional belum mendapatkan respons yang menggembirakan, mengapa tidak memanfaatkan yang telah ada legal basis-nya? Fleksibilitas tersebut diatur oleh hukum internasional untuk mewujudkan keadilan dalam perlindungan paten, yaitu keadilan bagi pemegang hak dan masyarakat.		

Data no: 2 (3 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Dua Triliun…tapi Bo'ong	Judul	-
2.	HEROIK tenan! Pahlawan sejati! Begitu guman banyak pihak saat menyimak warta tentang seorang warga yang menghibahkan uang senilai dua triliun rupiah kepada negara. Untuk penanggulangan Covid-19, katanya. Prosesi penyerahterimaan hibah pun dibikin gebyar-gebyar. Para pemuka daerah, dengan rupa-rupa seragam, tampil di hadapan awak media. Tapi, ibarat komik anak yang baru belajar membaca, kisah keteladanan itu cuma terdiri atas beberapa halaman. Antiklimaks, prank total! "Aneh"-nya, kalau dipikir ulang, kenapa publik terperanjat saat kebohongan itu tersibak?	Pengenalan isu	1-2
3.	Si tersangka memang bikin kegemparan dengan melakukan	Argumentasi	3-4

	kebohongan di musim pagebluk. Di saat ratusan juta orang Indonesia nelangsa hidupnya, si tersangka malah asyik bikin guyonan tak lucu. Tapi, terdakwa tipikor yang notabene mantan menteri sosial juga melakukan hal serupa. Bahkan lebih parah; tersangka dua triliun belum mempermainkan uang sama sekali, sementara mantan Mensos sudah kentara besaran uang yang begitu fantastisnya. Dengan kata lain, si tersangka 2T belum mengakibatkan kerugian finansial apa pun, sedangkan mantan Mensos sudah nyata nominal kerugian yang ia akibatkan. Juga tak perlu kaget sekaget-kagetnya karena setiap manusia faktanya juga mengutarakan kebohongan setiap hari. Rata-rata 1,65 kali per hari. Juga, 60 persen sudah menceritakan kebohongan hanya dalam kurun sepuluh menit sejak dimulainya percakapan. Itu semua temuan riset. Alhasil, secara alami, manusia memang makhluk pendusta alias natural liars (NL).		
4.	Khusus bagi si tersangka 2T, sekiranya hasil pemeriksaan kejiwaan menyimpulkan bahwa dia mengidap masalah klinis berat semisal skizofrenia, apa boleh buat: pasal 44 KUHP (tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana). Sekiranya dia dijerat dengan pasal penipuan, maksimal 4 tahun penjara. Iming-iming dua triliunnya ”tak berbeda” dengan lima ratus perak. Atau, agar bobotnya lebih serius, jangan-jangan kebohongan si tersangka 2T akan diposisikan sebagai penganiayaan ringan yang memunculkan perasaan tidak enak. Dengan pasal-pasal pidana yang ”maksa” seperti itu, bisalah si tersangka 2T nanti dijatuhi hukuman	Penegasan	11-13

	badan berupa penjara 3 bulan atau 2 tahun 8 bulan. Plus, mungkin, denda yang jumlahnya sangat ala kadarnya. Ecek-ecek, memang. Toh tidak ada pasal atau ayat pidana yang mengatur bahwa warga sipil yang sukses mengelabui pejabat daerah dan aparat penegak hukum dikenai pemberatan sanksi.		

Data no: 3 (4 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Masih Bermanfaatkah Terapi Plasma Konvalesen?	Judul	-
2.	SUNGGUH memprihatinkan. Di tengah-tengah kesulitan masyarakat melawan dampak Covid-19, segelintir orang malah memanfaatkan situasi. Tidak berusaha membantu meringankan beban sesamanya, malah ”mengais kesempatan” menjadi calo. Ya, saat ini media sosial ataupun siaran radio diramaikan berita betapa sulitnya mendapatkan plasma konvalesen (PK). Terbatasnya persediaan PK dan donornya melalui Palang Merah Indonesia (PMI) membuka peluang percaloan. Layaknya konsep supply and demand, si calo menawarkan jasa mereka mencarikan donor PK. Tentu saja tidak gratis. Menurut berita, ”harga” tiap kantong PK dibanderol Rp 4 hingga 20 juta.	Pengenalan isu	1-2
3.	Dalam sejarahnya, TPK dinyatakan bermanfaat untuk menanggulangi beberapa macam penyakit infeksi. Penyakit-penyakit tersebut antara lain mumps (gondongan), polio, measles (campak), rabies, influenza A (H1N1), avian influenza (H5N1), SARS (tahun 2003), MERS (tahun 2012), dan ebola.	Argumentasi	8-10

	Hingga kini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum menyatakan TPK sebagai standar pengobatan Covid-19. Pedoman WHO tersebut telah dipublikasikan pada 10 Juli 2020 dan diperbarui 17 Februari 2021. Mengacu pedoman tersebut, TPK pada Covid-19 masih dalam ranah terapi eksperimental. Food and Drug Administration (FDA) memberikan rekomendasi penggunaannya hanya untuk pengobatan darurat (emergency use authorization/EUA). FDA adalah BPOM-nya Negeri Paman Sam. Rekomendasi itu menyatakan, TPK sebatas kepentingan penelitian (investigational new drug/IND). Pedoman FDA telah mengalami pembaruan beberapa kali.		
4.	Penelitian itu melibatkan sekitar 25 rumah sakit di seluruh Indonesia dan dimulai September 2020. Kesimpulan uji klinis ini menyatakan, pada kasus dengan derajat sedang dan berat, tidak ada perbedaan yang bermakna dalam kematian. Artinya, antara yang mendapatkan TPK dan yang tidak, diperoleh hasil yang sama. TPK juga tidak terbukti dapat mencegah seseorang jatuh menuju kondisi yang lebih berat. Ventilator biasanya sangat diperlukan untuk mengelola kondisi demikian ini. Sebagai langkah solusi, banyak peneliti yang sepakat bahwa TPK masih bermanfaat. Bilamana? Harus diberikan pada fase dini perkembangan penyakit dan diperlukan PK yang mempunyai titer antibodi yang tinggi. Diperlukan peninjauan ulang TPK agar diperoleh manfaat yang optimal. Penyintas Covid-19 yang mendonorkan PK-nya juga dapat tersenyum lega.	Penegasan	16-17

Data no: 4 (5 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Blunder Pencitraan Politikus Menumpang Kemenangan Greysia-Apriyani	Judul	-
2.	DI ANTARA puja-puji di linimasa media sosial dari warganet atas kemenangan pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii-Apriyani Rahayu dalam partai final Olimpiade Tokyo, ada fenomena menarik. Beberapa akun melontarkan celetukan bernada minor tentang para politikus yang mengucapkan selamat kepada Greysia-Apriyani. Yang jadi masalah adalah penampilan foto para politikus itu, yang tak jarang justru lebih besar atau lebih jelas dibandingkan kedua atlet.	Pengenalan isu	1
3.	Cara para politikus menumpang popularitas ini bukan hal baru. Sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan mereka mencoba mencari popularitas dari momen yang menjadi perhatian publik. Yang unik dari momen kemarin ialah bagaimana antisipasi warganet terhadap cara-cara yang dilakukan. Publik seolah sudah hafal cara tersebut. Mungkin juga sudah bosan sehingga reaksi yang muncul justru tidak simpatik.	Argumentasi	3
4.	Selain itu, satu hal mendasar dalam komunikasi politik ialah pesan yang mencapai dan dipahami audiens. Hari ini, agar pesan tersampaikan pada pemilih relatif mudah dengan berkembangnya media sosial yang cepat, mudah, dan menyeluruh. Namun, untuk dipahami pemilih, pesan harus menyesuaikan kondisi dan karakter pemilih sebagai audiens, dalam bahasa kekinian related atau terkait. Para politikus mesti kembali	Penegasan	15-16

	pada prinsip dasar komunikasi, yaitu ketahui audiensmu. Dengan pemilih yang kini mulai kritis, cerdas, dan aktif, para aktor politik tak bisa lagi sekadar menampilkan wajah, menumpang momen, atau hanya berwacana. Pencitraan tidak bisa lagi dilakukan secara sporadis tanpa rencana. Atau, jangan-jangan mungkin pencitraan sudah usai?		

Data no: 5 (6 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Memikirkan Kembali Otoritas Keagamaan	Judul	-
2.	SULIT untuk tidak mengakui peran otoritas keagamaan di Indonesia. Tetapi karena penduduknya mayoritas beragama Islam, otoritas keagamaan Indonesia dipegang oleh organisasi-organisasi Islam. Organisasi Islam di Indonesia secara statistik diwakili oleh NU dan Muhammadiyah. Pendek kata, keduanya adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang memegang otoritas di bidang keagamaan. Namun, perjalanan NU dan Muhammadiyah tidak selamanya berlangsung harmonis, minimal dari sisi metodologi sekaligus interpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Keduanya sempat berselisih tentang hukum rokok dan monogami bagi para pengikutnya, sebagaimana keduanya kadang berselisih tentang penetapan 1 Syawal dalam penanggalan Hijriah.	Pengenalan isu	1-2
3.	Kita tidak bisa mengabaikan kontribusi NU-Muhammadiyah dalam hal menangkal paham keagamaan	Argumentasi	11

	konservatif-radikalis. Itu upaya mulia karena mempertahankan integritas bangsa agar tidak seperti negara-negara di Timur Tengah yang porak-poranda karena sentimen agama. Tetapi, problem kebangsaan kita hari ini tidak berhenti sampai di situ. Ada problem mendasar lain yang tidak kalah membahayakannya; ketimpangan sosial-ekonomi yang melanda sebagian besar pengikutnya.		
4.	Ke depan kita ingin melihat NU-Muhammadiyah bisa tampil dengan wajahnya yang lebih fresh, progresif, dan memihak pada kepentingan kaum lemah. Kita ingin melihat keberpihakan keduanya terhadap nasib rakyat yang digusur tempat tinggalnya atas nama pembangunan. Yang diambil paksa tanah tempat mereka bercocok tanam. Yang direpresi oleh negara hanya karena mempertahankan kekayaan sumber daya alam dan budayanya dari cengkeraman korporat.	Penegasan	14-15

Data no: 6 (9 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Billboard Capres di Masa Pandemi Covid-19	Judul	-
2.	DI tengah usaha keras menanggulangi pandemi, sejumlah elite politik malah sibuk berkompetisi di jalanan dengan memasang billboard memakai foto terbaik mereka. Alih-alih tebar optimisme dalam menghadapi pandemi, mereka tebar pesona dengan jargon dan pesan yang tidak relevan dengan situasi terkini. Apakah itu bentuk komunikasi politik yang tidak empatik? Atau malah para elite politik	Pengenalan isu	1

	yang terlalu malas mengembangkan cara berkomunikasi baru di era Covid-19?		
3.	William Hatcher (2020) menulis, ketidakseriusan Donald Trump dalam penanganan pandemi di Amerika Serikat (AS) telah memberikan pelajaran berharga. Rakyat AS tidak memilih kembali kandidat dari Partai Republik tersebut untuk periode 2021–2025. Kasus Trump menunjukkan betapa berbahayanya mempunyai elite politik yang tidak menyadari pentingnya krisis yang terjadi. Trump yang lebih sibuk membela diri sendiri dan cenderung narsis dipandang tidak peduli kepada rakyatnya. Hal itu menimbulkan krisis tambahan, yaitu krisis kepercayaan publik.	Argumentasi	8
4.	Alih-alih menawarkan jargon yang abstrak, lebih baik promosi elite politik dilakukan dengan memberikan solusi masalah riil di masyarakat. Iklan dibuat secara simpatik dengan memanfaatkan beragam medium yang ada. Misalnya berisi optimisme menghadapi Covid-19 dan memperkuat kampanye memakai masker serta menjaga protokol kesehatan. Wajah dan postur elite politik tidak perlu selalumuncul. Berikan pendidikan kepada masyarakat bahwa yang penting adalah bergerak bersama untuk keluar dari krisis, bukan sibuk menjajakan foto diri dengan jargon yang bikin risi.	Penegasan	12

Data no: 7 (10 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Hijrah dan Fenomena Global Islam	Judul	-
2.	Bahaya radikalisme ajaran agama belakangan ini menjadi perhatian pemerintah karena mengancam keberagaman di Indonesia. Peringatan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Kota Makkah ke Madinah, selain menghidupkan nilai-nilai perjuangan Rasulullah, juga sangat tepat untuk dijadikan deradikalisme. Bangsa kita sangat menghargai dan menghormati kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi NKRI.	Pengenalan isu	2
3.	Dalam laporan bertajuk Mapping the Global Muslim Population, sebuah lembaga survei yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat, The Pew Forum on Religion and Public Life menyodorkan data tentang jumlah muslim dunia yang melonjak hampir 100 persen dalam beberapa tahun terakhir. Angka pasti menurut laporan itu, jumlah penganut Islam di seluruh dunia saat ini telah mencapai 1,57 miliar jiwa. Artinya, satu di antara empat penduduk dunia mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan keseharian mereka.	Argumentasi	8-9
4.	Lepas dari data statistik itu, negeri-negeri Islam secara umum adalah populasi dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Seperti nasib umat Islam di Afrika (Ethiopia, Nigeria, Somalia) dan Asia (Pakistan, Bangladesh, India, termasuk Indonesia). Padahal, negeri-negeri	Penegasan	14-16

	Islam secara umum punya kekayaan alam yang melimpah ruah. Tingkat kebodohan di dunia Islam masih tinggi. Secara politik, jumlah populasi muslim yang besar itu tidak membuat umat Islam menjadi negara adidaya. Meskipun sudah merdeka secara formal, sebagian besar negeri Islam masih berada dalam bayang-bayang penguasa global seperti AS. Maka, tidaklah mengherankan meskipun jumlahnya besar, umat Islam tidak bisa membebaskan diri atau membebaskan saudaranya yang ditindas di berbagai kawasan dunia Islam seperti Chechnya, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Xinjiang, Bosnia, atau Palestina. Umat Islam belum bisa berbuat banyak menghentikan kekejaman Israel.		

Data no: 8 (12 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Pelayanan Terpadu untuk Warga Desa	Judul	-
2.	SALAH satu visi politik pengaturan desa melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah politik kesejahteraan, yang salah satunya dijalankan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada warga desa. Jamak dipahami, kebutuhan kesejahteraan warga desa sangatlah beragam dan butuh segera dilayani. Karena itulah, desa harus mampu dengan baik mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa agar mampu memadukan dan menjawab berbagai kebutuhan layanan di desa.	Pengenalan isu	1

3.	Sebagian besar pendanaan posyandu bersumber dari APB desa. Pada 60.066 atau 80 persen desa, sumber pendanaan posyandunya sepenuhnya dari APBDes. Kemudian, di 7.411 atau 10 persen desa, pendanaan posyandu bersumber dari APBDes dan dana dari warga. Sedangkan di 1.564 desa, warga secara sukarela beriuran untuk mendukung posyandu. Sementara pada desa-desa lainnya pendanaan posyandu ditunjang oleh perusahaan, pemerintah daerah, maupun sumber lainnya. Mulanya posyandu untuk mengintegrasikan layanan kesehatan ibu sebelum melahirkan, pasca kelahiran, hingga tumbuh kembang bayi dan anak. Dalam perkembangannya, upaya keterpaduan beragam layanan di desa menjelmakan pengembangan layanan posyandu. Kini lahan keterpaduan posyandu kian meluas. Di Desa Banjartanggul, Mojokerto, misalnya, telah dikembangkan layanan pos PAUD untuk memulai pendidikan anak sejak usia dini. Kemudian, layanan untuk remaja telah dijalankan Desa Banjarsari, Lombok Timur, berupa timbang badan dan mencukupi gizi serta konsultasi dan informasi seputar kehidupan remaja. Posyandu di Desa Pucanganak, Trenggalek, Jawa Timur, juga telah melayani warga lansia untuk mempertahankan kebugaran dan menjaga psikologisnya.	Argumentasi	5-7
4.	Data SDGs Desa dapat menunjukkan layanan yang dibutuhkan warga desa. Di dalamnya tersaji informasi alamat tiap-tiap keluarga yang membutuhkan berbagai layanan, mulai rumah sehat, fasilitas MCK, air bersih, pemanfaatan bantuan perlindungan sosial, maupun layanan lainnya. Diketahui juga nama	Penegasan	18-19

	dan alamat warga yang berusia bayi, balita, anak, remaja, hingga lanjut usia. Diperoleh pula data warga yang membutuhkan layanan pendidikan usia dini, ibu hamil dan menyusui, warga difabel, anak tidak sekolah, miskin dan miskin kronis, serta penderita penyakit menahun seperti malaria, TB paru, jantung, diabetes, dan lainnya. Data mikro dan detail di tiap desa ini menjelaskan kebutuhan warga. Inilah fokus kerja yang perlu dijalankan pos pelayanan terpadu. Sebab, posyandu adalah wujud kelembagaan yang mampu memberikan layanan bagi warga dengan memadukan kerja-kerja mencapai 18 tujuan SDGs Desa. Kita Percaya, Desa Bisa!		

Data no: 9 (13 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Melonjaknya Angka Kematian Ibu Hamil	Judul	-
2.	PANDEMI membuat layanan kesehatan di seluruh dunia kelabakan. Banyak negara berkembang mengalami kelumpuhan sistem pelayanan kesehatan. Semua upaya kesehatan fokus pada pelayanan Covid-19. Fasilitas kesehatan kebanjiran pasien Covid-19 setelah libur panjang dan serangan varian baru.	Pengenalan isu	1
3.	perlu dipikirkan program nasional mewajibkan tes PCR ibu hamil yang akan bersalin, bisa dimulai pada usia kehamilan 36 minggu. Ibu hamil wajib difasilitasi pemeriksaan PCR secara cuma-cuma di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau berbayar di fasilitas kesehatan swasta. Meski hasil PCR	Argumentasi	7-8

	adalah gambaran sesaat pada saat tes, paling tidak bisa menyaring ibu hamil yang positif Covid-19, mengingat banyak orang terpapar tanpa gejala. Data POGI menunjukkan, 51,9 persen ibu hamil yang terpapar Covid-19 tidak bergejala. Di luar itu, ibu hamil juga perlu mendapat perlindungan agar jangan sampai terpapar virus korona. Salah satunya melalui program vaksinasi. Pada awal program vaksinasi Covid-19 di tanah air, ibu hamil termasuk kelompok masyarakat yang belum diizinkan mendapat vaksinasi.		
4.	Yang harus mendapat perhatian adalah saat pelaksanaan vaksin. Sebaiknya tidak dalam waktu bersamaan melibatkan ribuan ibu hamil. Vaksinasi bisa melalui puskesmas atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk dan jadwalnya fleksibel sehingga antrean ibu hamil untuk mendapat vaksin tersebar, tidak menumpuk dalam satu sampai dua hari. Bisa juga dipikirkan untuk vaksinasi secara drive-thru. Ibu hamil tidak perlu turun dari kendaraan untuk mendapat suntikan. Hal itu membuat ibu hamil tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendapat suntikan, cukup sambil duduk di dalam kendaraan. Pada akhirnya, ibu hamil harus mendapat perhatian di tengah pandemi. Kematian ibu hamil merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan suatu negara. Mari kita proteksi ibu hamil dari Covid-19. Memberikan pelayanan khusus, skrining, dan vaksinasi merupakan senjata pertahanan efektif untuk mencegah ibu hamil dari serangan Covid-19. Generasi sehat dihasilkan oleh kehamilan dan persalinan yang sehat.	Penegasan	12-13

Data no: 10 (16 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Merdeka dari Kemiskinan, Sebuah Keniscayaan!	Judul	-
2.	PANDEMI Covid-19 membuat hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, tergagap untuk mengatasinya. Bagaimana tidak, selain memiliki daya tular (infectious power) cepat, Covid-19 mempunyai kemampuan metamorfosis dalam beragam varian. Varian Delta Covid-19 yang melanda Indonesia Juli lalu sempat menjadi teror mental menakutkan. Setiap kali musala atau masjid desa/kelurahan menyampaikan pengumuman, kalimat yang terucap: inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pertanda ada warga yang meninggal. Terjadi saling bersahutan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam satu desa/kelurahan, terdapat kasus meninggal karena Covid-19, tiga sampai empat orang, bahkan lebih.	Pengenalan isu	1-2
3.	Dari sejumlah bansos yang dikucurkan, sebenarnya lebih dari cukup bagi warga miskin atau terdampak Covid-19 untuk bisa bertahan hidup. Contoh, dengan total penduduk Sidoarjo 2.051.110 (setara dengan 659.324 KK), bansos yang disampaikan mampu menjangkau 66,68 persen atau 406.665 KK. Persoalannya adalah mengapa hingga saat ini masih saja dijumpai ada warga mampu yang menerima bansos (inclusion error), tetapi ada warga tidak mampu yang tidak memperoleh bansos (exclusion error)?	Argumentasi	7

4.	Tetapi, bagi kepala desa terpilih yang memiliki jiwa kesatria sejati, ketika pilkades usai, saat itu juga di dalam hati dan pikiran mereka akan mendeklarasikan bahwa dirinya bukan hanya kepala desa bagi rakyat pemilih. Yang tidak memilih pun juga merupakan rakyat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial. Dengan kelapangan hati dan pikiran suci pemimpin semacam itulah barangkali pengentasan kemiskinan akan dapat dilakukan. Nelson Mandela, presiden Afrika Selatan (1994–1999), pernah mengingatkan, ”Mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal. Itu merupakan tindakan keadilan. Itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan sejati.” Memerdekakan rakyat dari kemiskinan adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Bukankah begitu?	Penegasan	12-13

Data no: 11 (17 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Sisik Melik Merdeka Melintasi Pandemi Covid-19	Judul	-
2.	KETAHUILAH bahwa kata ”merdeka” itu lahir dengan diplomasi strategis dan taktis hebat para pejuang bangsa. Seperti dilaporkan verslaggever (reporter) surat kabar Darmokondo (1928), memang terdapat larangan pengucapan kata ”merdeka” dalam Kongres Pemuda Indonesia (1928). Polisi menyetop pembicara yang bersuara ”merdeka” sehingga rapat menjadi gaduh. Maka, sewaktu	Pengenalan isu	1

	mengawali Kongres Pemuda Indonesia di Sabtu sore 27 Oktober 1928, yang berlangsung dalam pengawasan ketat aparatur kolonial, selaku ketua sidang, Soegondho tampil cerdik nan memukau: ”… toean-toean pembitjara soepaja djangan goenakan kata ’kemerdekaan’ … dan harap toean-toean haroes ’tahoe sama tahoe sadja’”.		
3.	Dalam koridor ilmu hukum, proklamasi merupakan revolusi hukum yang menerabas tatanan hukum kolonial. Proklamasi menjadi tindakan politik tanpa dasar hukum, tetapi menjadi sumber hukum yang berlegitimasi sosial politik tinggi. Tahapan ini merupakan titik simpul yang paling menentukan lahir dan berkembangnya sebuah negara bangsa (nation state) yang dinamakan Indonesia (NKRI). Para pendiri sehaluan dengan ungkapan Soekarno bahwa UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 adalah wujud revolutie-grondwet (konstitusi produk revolusi).	Argumentasi	4
4.	Saya merekam apresiasi publik kepada civitas academica yang telah menghadirkan riset inovatif, pengabdian kemanuiaan, dan melakukan fasilitasi vaksinasi sampai di desa-desa sebagai keterpanggilan kebangsaan. Bukan sosok terpelajar yang menjadi pendengung ”energi negatif” maupun hoaks. Khalayak ramai tahu bahwa Indonesia tidak cukup hanya berubah, tapi juga berbenah agar tangguh dan tumbuh. Saatnya memperkuat solidaritas, bergotong royong meringankan beban sesama warga bangsa dengan tetap lantang berseru merdeka. Akhirnya penuh syukur berdoa: Dirgahayu	Penegasan	9

	Indonesia. Inilah karunia terindah Tuhan Yang Maha Esa.		

Data no: 12 (18 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Merdeka dari Sindrom Inferiority Complex	Judul	-
2.	HARI Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan RI kembali dirayakan di tengah masa pandemi Covid-19. Jika melihat persebaran pandemi yang cenderung melandai, terdapat secercah harapan di benak masyarakat akan kemampuan bangsa ini keluar dari kubangan pandemi. Tentu optimisme ini menjadi modalitas psikososial yang dapat dikonversi menjadi komitmen, tekad bersama, dan ikhtiar nyata untuk menanggulangi Covid-19 secara lebih serius lagi.	Pengenalan isu	1
3.	Istilah merdeka memiliki dua konotasi makna. Pertama, merdeka dalam pengertiannya yang negatif seperti ditunjukkan dalam ungkapan ”merdeka dari” (freedom from) dan makna positif atau ”merdeka untuk” (freedom to). Dalam pengertiannya yang negatif, Hayek (2006) mendefinisikan merdeka sebagai ”the state in which a man is not subject to coercion by the arbitrary will of another”. Kemerdekaan adalah sebuah kondisi ketika seorang individu tidak tunduk pada paksaan kehendak orang lain yang sewenang-wenang. Dengan demikian, sumber dari ketidakmerdekaan seseorang adalah pemaksaan personal yang mengungkung kebebasan orang lain. Konotasi makna merdeka yang kedua adalah dalam pengertiannya yang positif. T.H. Green (1986)	Argumentasi	9-10

	mendefinisikan kemerdekaan yang positif sebagai ”the positive power or capacity of doing or enjoying something worth doing…and something that we…enjoy in common with others”. Konsep merdeka dalam konteks ini didefinisikan sebagai determinasi rasional yang bersifat otonom dari seorang individu serta tidak mengebiri kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan secara positif melibatkan unsur kesadaran diri atau kemampuan membuat keputusan.		
4.	Sindrom semacam ini telah lama menjadi ”penghalang mental” bagi bangsa ini untuk berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Penghalang mental ini pula yang membuat kitaselalumerasa puas sebagai bangsa medioker alias biasa-biasa saja. Padahal, Presiden Soekarno (1964) telah memformulasikan konsep Trisakti dalam rangka mengatasi sindrom inferiority complex ini, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kenyataannya, mengatasi sindrom inferiority complex tidak semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan pengerahan total segenap energi bangsa untuk melangkah bersama meraih kejayaan NKRI.	Penegasan	12-13

Data no: 13 (19 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Lonjakan Investor Ritel dan Tantangan Pasar Modal	Judul	-
2.	Kenaikan investor ritel tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19 dan besarnya generasi milenial. Pandemi	Pengenalan isu	2

	Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 membawa banyak perubahan dalam tatanan ekonomi berbagai negara. Sebagian orang harus bekerja di rumah. Sebagian lagi bekerja di kantor, tetapi langsung pulang ke rumah di jam pulang kantor. Orang sekarang jarang yang nongkrong di kafe, makan di restoran, tapi semua dilakukan dengan online. Ini membuat jam kosong orang bertambah, ditambah pengeluaran juga berkurang.		
3.	Kejahatan di industri keuangan yang dikenal dengan kerah putih memang sulit dideteksi karena pelakunya berpengalaman, mengetahui aturan, dan mempelajari celah hukum. Hanya dengan audit yang benar-benar cermat kejahatan ini mampu diidentifikasi. Kasus ini sekarang ditangani Kejaksaan Agung dengan beberapa orang yang dianggap terlibat telah dijatuhi hukuman. Selain kasus Jiwasraya, ada kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang juga ditangani Kejaksaan Agung. Bahkan, Kejaksaan Agung menganggap kasus ASABRI merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian Rp 23,7 triliun. Beberapa nama yang terlibat kasus Jiwasraya kembali disebut-sebut terlibat dalam kasus ASABRI. Dalam dua kasus ini, keluar beberapa nama manajer investasi yang juga dijadikan tersangka atau tersangka korporasi.	Argumentasi	8-9
4.	Beberapa kasus yang menjerat institusi asuransi dan manajer investasi membuat banyak lembaga pengelola dana menjadi superhati-hati dalam menaruh dananya di pasar modal. Hal ini terutama bagi lembaga keuangan	Penegasan	11-12

	yang ada kaitan dengan pemerintah, baik BUMN, BUMD, maupun pemerintah sendiri. Pengelola dana tersebut tentu khawatir bila kerugian investasi akibat perubahan kondisi ekonomi atau kinerja perusahaan dikriminalisasi. Kerugian murni karena investasi dianggap sebagai kerugian negara sehingga terancam pidana. Hal inilah yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Lebih banyak saham berkapitalisasi kecil yang mengalami kenaikan signifikan. Sedangkan saham-saham blue chip yang berfundamental kuat serta berkapitalisasi besar tidak terlalu bergerak. Saham-saham berfundamental kuat biasa dipegang oleh institusi yang saat ini terlihat sangat berhati-hati dalam berinvestasi.		

Data no: 14 (20 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	KPK dan Tubir Korupsi	Judul	-
2.	KOMNAS HAM menguak fakta terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada 11 hal yang dilanggar. Antara lain, hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman (Jawa Pos, 16/8/2021).	Pengenalan isu	1
3.	Bagaimanapun, ketua KPK tak boleh masa bodoh, khususnya terhadap temuan Komnas HAM atau tuntutan ORI agar KPK mengangkat 75 pegawainya sebagai ASN berhubung TWK sarat dengan maladministrasi. Itu	Argumentasi	11-12

	merupakan representasi desakan moral publik untuk menyelamatkan muka KPK dari keburukan integritasnya. Hanya itu yang bisa memperkuat taring KPK ke depan untuk mematahkan tulang kaki-kaki para koruptor yang terus berupaya melangkahi ''mayat'' kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita sepakat negara ini sedang di tubir pandemi korupsi mematikan. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi korupstaat manakala institusi dan penegak hukum dibiarkan diambil alih gerombolan koruptor. Hal tersebut terlihat jelas, misalnya dari fenomena vonis hukuman rendah terhadap koruptor yang antara lain dinikmati Pinangki dan Djoko Tjandra.		
4.	Dalam keresahan itulah, bangsa ini sangat membutuhkan benevolensi elite yang memproteksi arus kuat kebencian dan permusuhan kolektif terhadap banalitas korupsi. Meminjam pendapat Joel S. Migdal, pemimpin (presiden) dan elite politik (parpol, DPR) harus berani dan bisa merelevansikan faedah kehadiran negara (state in practice) dalam kehidupan konkret rakyat. Salah satunya dengan menjustifikasi dan memperkuat temuan korektif Komnas HAM dan ORI di atas agar dipatuhi dan dijalankan KPK. Presiden punya otoritas yang kukuh untuk meluruskan segala penyimpangan yang dilakukan KPK secara mulus. Presiden memiliki modal sosial yang cukup signifikan untuk melakukannya karena publik sedang menaruh harapan besar terwujudnya reformasi di KPK.	Penegasan	13-14

Data no: 15 (23 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Bank Digital Perluas Akses Keuangan	Judul	-
2.	MELALUI POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, OJK tidak mendefinisikan bank digital sebagai suatu bank jenis baru. Istilah ”bank digital” tidak lantas mengubah bank secara kelembagaan. Bank tetaplah bank, apa pun model bisnisnya. Jadi, tidak perlu mendikotomikan antara bank yang belum memiliki layanan digital, bank yang telah memiliki layanan digital, bank yang menerapkan model bisnis bank digital secara hybrid, dan bank digital hasil transformasi dari bank existing. Atau, bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (full digital bank).	Pengenalan isu	1-2
3.	Dalam pilar kedua road map pengembangan perbankan Indonesia (RP2I) 2020–2025, telah dicantumkan strategi yang ditempuh OJK untuk mengakselerasi transformasi digital perbankan. Yaitu, penguatan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi (TI), mendorong penggunaan IT game changers, mendorong kerja sama terkait dengan teknologi, dan mendorong implementasi advanced digital bank. Beleid tersebut juga mengatur modal inti minimum pendirian bank digital. Jika bank digital yang baru berdiri setelah POJK ini berlaku, harus ada besaran modal inti Rp 10 triliun. Kalau bank existing yang bertransformasi menjadi bank digital, wajib dipenuhi modal inti paling sedikit Rp 3 triliun. Sedangkan bank digital yang	Argumentasi	10-11

	merupakan konversi dari bank existing harus bermodal inti Rp 1 triliun.		
4.	Bertambahnya modal inti itu seiring dengan pesatnya perkembangan industri perbankan. Sehingga tidak mungkin lagi memakai aturan lama yang sudah puluhan tahun. Berdasar riset OJK, bank baru dengan modal inti di bawah ketentuan baru secara skala ekonomi tidak akan mumpuni. Memang, meski dengan modal inti di bawah ketentuan baru, bank masih bisa meraup laba. Namun, tidak akan berkontribusi terhadap ekonomi nasional.	Penegasan	12-13

Data no:16 (24 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Dampak Vaksinasi Covid-19 Ketiga di Amerika Serikat	Judul	-
2.	SEPERTI yang telah diperkirakan sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat (AS) akhirnya mengumumkan akan memberikan vaksinasi ketiga bagi seluruh rakyatnya. Vaksinasi akan dimulai September 2021 dengan prioritas pada tenaga kesehatan (nakes), para lansia, dan orang dengan komorbid. Jarak vaksinasi ketiga dari vaksinasi kedua sedikitnya delapan bulan. AS mulai memberikan vaksin Covid-19 pada November 2020. Sebagaimana dalam aspek lain juga, keputusan AS tersebut akan berdampak signifikan bagi dunia.	Pengenalan isu	1
3.	Cakupan dosis pertama dan kedua di AS telah mencapai sedikit di atas 50 persen. Di dunia, angka di atas 70 atau bahkan 80 persen telah dicapai oleh	Argumentasi	4-5

	beberapa negara yang mayoritas adalah negara kecil berpenduduk sedikit. Seperti Malta, Islandia, Qatar, dan Singapura. Negara raksasa umumnya belum mencapai taraf yang memuaskan. Indonesia baru berada di kisaran 20 persen, India sekitar 30 persen, dan Nigeria bahkan belum 2 persen. Tiongkok sebenarnya telah mendistribusikan lebih dari 1 miliar dosis vaksin. Namun, pencatatan negeri ini di dunia internasional agak tidak jelas. Dengan angka yang telah dicapai ini, AS akan memasuki periode tersulit dalam pencapaian cakupan imunisasi. Kelompok paling belakang yang menjadi sasaran adalah para penentang vaksinasi garis keras serta mereka yang tidak bisa divaksin karena berbagai alasan. AS adalah salah satu markas besar para antivaksin dunia. Bisa dibayangkan akan sangat sulit bagi pemerintah AS menggenapi cakupan sampai tingkat seperti Singapura misalnya.		
4.	Kiranya langkah terbijak adalah mempercepat penyelesaian imunisasi bagi dua kelompok dengan cakupan terendah, yaitu para lansia dan masyarakat umum. Kelompok nakes dan pelayan publik saat ini sudah mampu mencapai hasil yang jauh lebih baik. Sedangkan untuk remaja, kelompok difabel, dan ibu hamil relatif baru mulai. Selain itu, di dalam negeri ada sangat banyak pakar yang akan memberikan masukan yang realistis mengenai situasi dan kondisi lokal sehingga kita tidak terjebak pada keinginan meniru negara lain dengan serta-merta.	Penegasan	13

Data no: 17 (25 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Menyorot Vonis Juliari Batubara, Korupsi Struktural dan Ujian KPK	Judul	-
2.	NEGERI ini sepertinya sudah tersandera oleh kasus-kasus korupsi. Berbagai kasus korupsi terjadi, baik pada level pusat maupun daerah. Melibatkan pejabat pusat maupun pejabat daerah. Korupsi sudah menggurita mulai Sabang sampai Merauke. Terkait dengan mengguritanya korupsi, Buya Syafii Maarif pernah mengatakan, ”Korupsi sudah sedemikian kuat membelenggu kita, mulai istana sampai ke kantor kelurahan, sejak bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, sejak lahir sampai meninggal. Merambah dari tempat ibadah sampai ke toilet.”	Pengenalan isu	1-2
3.	Secara teoretis, korupsi struktural memiliki hukum kekuasaan sendiri sehingga sulit diurai dengan menggunakan hukum positif konvensional. Menurut Star dan Collier (1985), dalam pandangan paradigma hukum kritikal, hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral, tetapi merupakan ”sesuatu” yang diciptakan oleh suatu badan hukum dengan tujuan memberi keuntungan kepada sekelompok orang di atas kerugian sekelompok orang lain. Hukum bagi pendekatan kritik adalah cara untuk mendefinisikan dan menegakkan tertib yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lain. Sementara dalam pandangan Wallace dan Wolf (1980), hukum tidak dipandang sebagai norma yang berasal dari konsensus sosial, tetapi ditentukan	Argumentasi	9-10

	dan dijalankan oleh kekuasaan dan substansi hukum dijelaskan dari kacamata kepentingan mereka yang berkuasa.		
4.	Berdasar fakta-fakta di persidangan skandal bansos, ada indikasi yang mengarah pada keterlibatan orang-orang di lingkaran kekuasaan. Karena itu, dalam konteks kasus korupsi struktural, ini akan menjadi ujian dan pertaruhan bagi KPK, apakah berani dan profesional dalam menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Ujian apakah berani dan konsisten untuk membongkar korupsi struktural ini sampai melahirkan ”big fish”. Kasus korupsi tersebut diduga melibatkan orang-orang besar dengan kekuasaan yang besar pula. Kita berharap KPK bekerja secara profesional dan konsisten. Tidak terpengaruh dengan desakan publik atau tekanan politik dari mana pun dan siapa pun. Gebrakan KPK akan ditunggu publik, terutama terkait dengan calon tersangka lain yang berasal dari lingkaran kekuasaan.	Penegasan	13-14

Data no: 18 (26 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Mencari Alternatif Sumber Pertumbuhan Ekonomi	Judul	-
2.	RILIS Badan Pusat Statistik (BPS) tentang ekonomi Indonesia kuartal II 2021 yang tumbuh 7,07 persen (YoY) melegakan. Ini setidaknya mengonfirmasi Indonesia sudah lepas dari resesi atau meninggalkan zona kontraksi. Semua komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif dengan	Pengenalan isu	1

	kontribusi lebih baik dibanding kuartal-kuartal sebelumnya.		
3.	Komponen konsumsi pemerintah dan investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) yang juga tumbuh baik, masing-masing 8,06 persen (YoY) dan 7,54 persen (yoy), mampu menjadi sumber pertumbuhan PDB masing-masing 0,61 persen (YoY) dan 2,30 (YoY). Alhasil, masing-masing mampu berkontribusi terhadap pembentukan PDB sebesar 8,51 persen dan 29,86 persen. Perlu dicermati, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga (KRT) sebesar 5,93 persen (YoY) berkontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi sebesar 3,17 persen (YoY) dengan kontribusi 55,07 persen terhadap total PDB. Lantaran inilah pertumbuhan tahunan KRT harus diupayakan minimal 5 persen (YoY) karena kontribusi terbesarnya terhadap total PDB sehingga mampu menjaga kestabilan ekonomi.	Argumentasi	7-8
4.	Ke depan, perlu dilakukan pemerataan PDB secara regional/spasial, di mana untuk kawasan yang perekonomiannya tumbuh di bawah pertumbuhan nasional harus diberi perhatian khusus. Terutama kawasan Bali dan Nusra sebagai daerah dengan sumber pendapatan utama berasal dari sektor pariwisata. Selain program vaksinasi massal di daerah-daerah tujuan wisata (DTW), kebijakan stimulus dan insentif tertentu bisa dipertimbangkan untuk diberikan, supaya sektor pariwisata (mencakup hotel, restoran, kafe, agen perjalanan, transportasi, komunikasi, dan hiburan) dapat segera bangkit. Sumber pertumbuhan ekonomi baru dari sektor	Penegasan	14-15

	pariwisata layak didorong mengingat Indonesia memiliki potensi besar di sektor ini.		

Data no: 19 (27 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Burden Sharing, Seberapa Genting?	Judul	-
2.	DI tengah tanda tanya tentang penanganan Covid-19 tahun depan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mufakat melanjutkan pembagian beban (burden sharing) pembiayaannya. Sesuai surat keputusan bersama (SKB) jilid III, BI kebagian mendanai program vaksinasi, kesehatan, dan penanganan kemanusiaan.	Pengenalan isu	1
3.	Kondisi semacam ini memaksa kembali BI membeli SBN yang dilepas asing di pasar sekunder. Kebijakan sterilisasi rupiah juga harus ditempuh lewat intervensi di pasar spot. Intervensi valuta asing dan pembelian SBN di tengah ketidakpastian terasa sangat mahal. Cadangan devisa dan ekuitas yang dimiliki BI bisa tergerus. Kekhawatiran di atas tampaknya masuk akal. Skema burden sharing seri I dan II sudah mengempiskan 8,64 persen rasio modal BI. Skema berbagi beban jilid III diproyeksikan akan menyusutkan ekuitas BI 8,9 persen dan mungkin mengecil lagi 5 atau 4 persen pada tahun depan.	Argumentasi	16-17
4.	Dengan konfigurasi problematika di atas, BI harus pandai-pandai menyeimbangkan antara kepentingan jangka pendek-menengah/panjang,	Penegasan	19-20

	tantangan eksternal-internal, dan tujuan domestik-luar negeri. Harus diakui, BI tidak sedang berada dalam kemewahan dengan gelimang opsi kebijakan. Namun, jika kegentingan dilematis itu sukses dikelola, misi BI menjadi bank sentral terdepan dan terbaik di antara emerging market perlahan akan terwujud.		

Data no: 20 (29 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Mural Politik dan Perebutan Ruang Publik	Judul	-
2.	KRITIK sosial bergenre seni mural belakangan ini muncul kembali secara ekspresif di berbagai ruang publik. Tak hanya di ruang fisik kota, visualisasi mural politik juga merambah di berbagai ruang publik virtual. Mural politik muncul tenggelam seiring dengan respons negara dalam menyikapinya. Yang paling fenomenal adalah munculnya mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo bertuliskan “404 Not Found”. Mural dengan visualisasi wajah mirip Presiden Jokowi yang terletak di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang akhirnya dihapus oleh petugas kepolisian pada Kamis (12/8/2021).	Pengenalan isu	1-2
3.	Umumnya, mural politik dibangun atas dasar kritik sosial. Street art tersebut hadir dengan memanfaatkan ruang-ruang publik yang sangat terbatas seperti tembok-tembok jalanan umum tanpa memerlukan biaya tinggi alias dengan peralatan seperlunya. Bahkan, hanya dengan cat bekas hitam putih-	Argumentasi	10

	pun, sebuah mural politik bisa diproduksi. Hanya saja, kehadiran street art tersebut kerap dituding sebagai vandalisme karena dianggap merusak dan mengancam ketertiban umum. Pasal karet itulah yang menyebabkan mural politik seringkali hilang disapu aparat. Mural politik tentu berbeda dengan baliho politik yang merepresentasikan kelas politik elite karena didesain dan dibangun berdasarkan kekuatan kapital. Kelas elite dalam konteks ini tidak hanya mencakup para elite parpol yang sedang bekerja dan berburu tiket Capres, tetapi juga kelas elite pada unit kekuasaan yang paling kecil di tingkat lokal, seperti calon-calon kepala desa yang sedang berburu suara untuk memenangkan pemilihan.		
4.	Check and balances sesungguhnya tidak hanya berlangsung di dalam sistem politik antar eksekutif dan legislatif, tetapi juga antara sistem politik dan masyarakat warga dalam bentuk public use of reason dalam ruang publik. Dalam perspektif komunikasi, ruang publik tentu memiliki fungsi dalam komunikasi politik masyarakat plural. Saat ini, ruang publik tampak kehilangan ruh publiknya dan berubah menjadi area privat yang dipublikkan. Harapan akan tumbuhnya partisipasi politik warga negara yang lebih luas dipatahkan oleh kenyataan bahwa ruang publik telah dimonopoli dan didesain untuk melayani kepentingan elite.	Penegasan	24-25

Data no: 21 (30 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Ini soal Keseriusan untuk Menuntaskan	Judul	-
2.	APA yang dibutuhkan untuk menuntaskan kasus BLBI adalah keseriusan pemerintah itu sendiri. Kita hanya bisa *wait and see*. Menunggu dan melihat seperti apa upaya yang dikerahkan kali ini akan membuahkan hasil. Kalau pemerintah serius, alhamdulillah. Kalau tidak serius, ya akan mengulang seperti yang sebelum-sebelumnya.	Pengenalan isu	1-2
3.	Jika pemerintah saat ini berhasil menarik utang BLBI, dampaknya akan sangat baik. Khususnya bagi pendanaan anggaran di masa pandemi Covid-19. Pemerintah bisa mendapat dana tambahan untuk memperkuat APBN dan menstimulus perekonomian. Bukan hanya ekonomi, penarikan utang BLBI akan membuat sistem perpolitikan nasional lebih sehat. Satgas BLBI, sebelum masa tugasnya berakhir pada Desember 2023, seharusnya bisa menarik seluruh utang yang selama ini mengendap. Kalau pemerintah benar-benar punya keseriusan dan keberanian yang besar, saya kira target pada 2023 tuntas bukanlah hal yang tidak mungkin.	Argumentasi	7-8
4.	Sudah beberapa kali ganti presiden, namun masalah ini belum terselesaikan. Saya kira akan sangat bagus jika Presiden Jokowi bisa menyelesaikannya. Agar ke depan kita tak lagi terbebani masalah yang tidak	Penegasan	10-11

	hanya menghambat perekonomian, tapi juga menjadi komoditas politik yang memecah belah anak bangsa. Sagas BLBI juga seharusnya bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait apa yang menjadi masalah di sini. Tak sekadar menagih, tapi juga menjelaskan seperti apa kasus BLBI sebenarnya. Transparansi penyelesaian kasus itulah yang seharusnya ditingkatkan. Kasus ini harus dituntaskan agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Praktik-praktik itulah yang seharusnya dijelaskan sedetail-detailnya supaya masyarakat memahami.		

Data no: 22 (31 Agustus 2021)

No.	Kutipan	Struktur Opini	Paragraf
1.	Kami Tetap Semangat meski Diterpa Badai	Judul	-
2.	SEJAK OTT di Nganjuk 9 Mei 2021, praktis sudah lebih dari 100 hari KPK baru kembali melakukan OTT. Operasi di Nganjuk merupakan kerja sama antara tim penyelidik KPK dan Bareskrim Polri. Penyidikan kasus itu kemudian ditangani Bareskrim. KPK memberikan bantuan dan dukungan kepada teman-teman kepolisian.	Pengenalan isu	1-2
3.	Soal OTT di Probolinggo, saya tidak ingin bicara banyak. Sebab, seperti yang sudah diketahui, KPK saat ini didera problematika internal dan eksternal. Saya tidak mau membahas banyak soal itu. Tapi, yang jelas, teman-teman memang minta arahan, masukan, serta bimbingan kepada saya. Berdasar pengalaman, saya	Argumentasi	5-6

	memberikan guidance dan pandangan terkait dengan teknis OTT kali ini. Kondisi ini tentu membuat saya sedih. Kenapa? Pertama, saya sangat mencintai KPK. Sama dengan cinta saya kepada keluarga. Meski KPK saat ini didera masalah, teman-teman tetap berusaha menunjukkan dedikasi secara optimal dan maksimal. OTT dini hari itu merupakan cara kami menunjukkan bahwa kami tetap semangat bekerja di tengah terpaan dan derai badai serta gelombang.		
4.	Dengan iktikad baik, kami terus bekerja memberantas korupsi dengan cara yang bermartabat dan bertanggung jawab. Semoga semangat kami bisa menular kepada masyarakat. Meski tidak sedikit yang prihatin melihat upaya pemberantasan korupsi saat ini.	Penegasan	7

Data no: 23 (2-31 Agustus 2021)

No.	Kaidah Kebahasaan Opini	Kutipan	Paragraf
1.	Adverbia Frekuentatif	✓ Biasanya "TPK juga tidak terbukti dapat mencegah seseorang jatuh menuju kondisi yang lebih berat. Ventilator **<u>biasanya</u>** sangat diperlukan untuk mengelola kondisi demikian ini" ***Jawapos.com*, 4 Agustus 2021** ✓ Sering "Cara itu juga dianggap hanya mendompleng isu, yang dalam bahasa kekinian **<u>sering</u>** disebut pansos atau panjat sosial.	13 2

		Berbagai cara dilakukan seperti akun Twitter yang mengumpulkan dan mengunggah ulang puluhan poster ucapan selamat dari pejabat publik, anggota DPR, anggota DPD, dan pengurus partai politik." ***Jawapos.com*, 5 Agustus 2021** ✓ Kadang "Keduanya sempat berselisih tentang hukum rokok dan monogami bagi para pengikutnya, sebagaimana keduanya **<u>kadang</u>** berselisih tentang penetapan 1 Syawal dalam penanggalan Hijriah." ***Jawapos.com*, 6 Agustus 2021** ✓ Selalu "Komunikasi yang merakyat, tanggap terhadap perubahan, serta tidak menempatkan diri **<u>selalu</u>** di atas (ya, seperti *billboard* yang berdiri tinggi) seharusnya dipakai para elite politik untuk mendapatkan kepercayaan tersebut". ***Jawapos.com*, 9 Agustus 2021**	2 10
2.	Konjungsi	- Koordinatif ✓ dan "Itu berarti belum sampai 9 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan vaksin masih sangat tinggi **<u>dan</u>** harus berebut dengan negara-negara lainnya." ***Jawapos.com*, 2 Agustus 2021** ✓ tetapi "Pemilih tak lagi sekadar kritis, **<u>tetapi</u>** juga aktif terlibat	1 8

		dalam pembentukan wacana di ruang publik." ***Jawapos.com*, 5 agustus 2021**	3
		✓ atau "Ini bukan tentang siapa yang menjadi dewan pengawas **<u>atau</u>** siapa yang tergabung dalam satgas BLBI." ***Jawapos.com*, 30 Agustus 2021**	3
		✓ Sedangkan "Dengan kata lain, si tersangka 2T belum mengakibatkan kerugian finansial apa pun, **<u>sedangkan</u>** mantan Mensos sudah nyata nominal kerugian yang Ia akibatkan." ***Jawapos.com*,3 Agustus 2021**	5
		✓ Serta "Tapi, yang jelas, teman-teman memang minta arahan, masukan, **<u>serta</u>** bimbingan kepada saya." ***Jawapos.com*, 21 Agustus 2021**	7
		- Subordinatif ✓ Setelah "Antibodi merupakan zat kebal yang terbentuk **<u>setelah</u>** sembuh dari suatu paparan alamiah penyakit infeksi." ***Jawapos.com*, 4 agustus 2021**	7
		✓ Hingga "Mulanya posyandu untuk mengintegrasikan layanan kesehatan ibu sebelum melahirkan, pasca kelahiran, **<u>hingga</u>** tumbuh kembang bayi dan anak." ***Jawapos.com*, 12 Agustus 2021**	12

		✓ Ketika "Tetapi, bagi kepala desa terpilih yang memiliki jiwa kesatria sejati, **<u>ketika</u>** pilkades usai, saat itu juga di dalam hati dan pikiran mereka akan mendeklarasikan bahwa dirinya bukan hanya kepala desa bagi rakyat pemilih." ***Jawapos.com*, 16 Agustus 2021**	3
		✓ Seperti "Bisa dibayangkan akan sangat sulit bagi pemerintah AS menggenapi cakupan sampai tingkat **<u>seperti</u>** Singapura misalnya." ***Jawapos.com*, 24 Agustus 2021**	3
		✓ Karena "Bagi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia, perbaikan ekonomi mereka berdampak positif **<u>karena</u>** bisa meningkatkan surplus neraca dagang Indonesia." ***Jawapos.com*, 26 Agustus 2021**	13 16
		✓ Sebelum "Hanya, pembelian SBN di saat situasi moneter belum mengharuskannya berimbas pada efektivitas instrumen moneter itu sendiri. Ringkasnya, BI sejatinya "mengijon" SBN **<u>sebelum</u>** "masa petik" tiba." ***Jawapos.com*, 27 Agustus 2021**	11
		✓ Yang "Ribuan baliho iklan **<u>yang</u>** menyerbu ruang publik secara	5

		tidak langsung menggiring alam bawah sadar manusia untuk terus berperilaku konsumtif." ***Jawapos.com*, 29 Agustus 2021** ✓ Agar "Kasus ini harus dituntaskan **agar** tidak ada lagi kesalahpahaman. Praktik-praktik itulah yang seharusnya dijelaskan sedetail-detailnya supaya masyarakat memahami." ***Jawapos.com*, 30 agustus 2021** ✓ Sebab "Soal OTT di Probolinggo, saya tidak ingin bicara banyak. **Sebab**, seperti yang sudah diketahui, KPK saat ini didera problematika internal dan eksternal." ***Jawapos.com*, 31 Agustus 2021** - Antarkalimat ✓ Selain itu "Apalagi sekadar menampilkan wajah, hanya berguna untuk mengenalkan saja tanpa berdampak signifikan pada kesukaan atau bahkan keterpilihan. **Selain itu**, satu hal mendasar dalam komunikasi politik ialah pesan yang mencapai dan dipahami audiens." ***Jawapos.com*, 5 Agustus 2021** ✓ Padahal "Umat Islam belum bisa berbuat banyak menghentikan kekejaman Israel. **Padahal**, jumlah penduduk Israel hanya 8 juta. Bandingkan dengan gabungan Iran (74 juta), Iraq	14 16 2 10

		(30 juta), Syria (20 juta), Arab Saudi (25 juta), Yaman (23 juta), dan Mesir (79 juta) saja, populasi muslim hampir mencapai 251 juta." ***Jawapos.com*, 10 Agustus 2021** ✓ Namun "Bangsa kita sangat menghargai dan menghormati kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi NKRI. **Namun**, kebebasan berekspresi di tengah keberagaman ini jangan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu yang bersifat radikal." ***Jawapos.com*, 10 Agustus 2021** ✓ Akhirnya "Saatnya memperkuat solidaritas, bergotong royong meringankan beban sesama warga bangsa dengan tetap lantang berseru merdeka. **Akhirnya** penuh syukur berdoa: Dirgahayu Indonesia." ***Jawapos.com*, 17 Agustus 2021** ✓ Karena itu "Model korupsi seperti ini yang sering kita sebut sebagai korupsi struktural karena melibatkan poros-poros kekuasaan. **Karena itu**, sulit diberantas sampai ke akar-akarnya." ***Jawapos.com*, 25 Agustus 2021**	4
3.	Verba	- Material ✓ Mengumpulkan-	

		mengunggah "Berbagai cara dilakukan seperti akun Twitter yang **<u>mengumpulkan</u>** dan **<u>mengunggah</u>** ulang puluhan poster ucapan selamat dari pejabat publik, anggota DPR, anggota DPD, dan pengurus partai politik." ***Jawapos.com*, 5 Agustus 2021** ✓ Menjatuhkan-melakukan "Dalam sidang di Pengadilan Tipikor DKI Jakarta, majelis hakim **<u>menjatuhkan</u>** vonis 12 tahun penjara kepada Juliari plus denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan ***<u>melakukan</u>*** tindak pidana korupsi bersama-sama dengan jumlah Rp 3,46 miliar." ***Jawapos.com*, 25 Agustus 2021** - Relasional Sebab-Akibat ✓ Sehingga "Semua penggunaan paten oleh pemerintah tersebut dalam upaya untuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS dan hepatitis B di Indonesia. **<u>Sehingga</u>** orang yang hidup dengan HIV dan hepatitis B memiliki akses terhadap obat-obatan penting tersebut." ***Jawapos.com*, 2 Agustus 2021** ✓ Mengakibatkan "Pembohong psikopat sengaja mendesain akal bulusnya demi memperoleh keuntungan (besar-besaran) bagi dirinya	2 5 11 5 8

		dan **<u>mengakibatkan</u>** kerugian (besar-besaran) terhadap korbannya." ***Jawapos.com*, 4 Agustus 2021**	5
		✓ Menimbulkan "Trump yang lebih sibuk membela diri sendiri dan cenderung narsis dipandang tidak peduli kepada rakyatnya. Hal itu **<u>menimbulkan</u>** krisis tambahan, yaitu krisis kepercayaan publik." ***Jawapos.com*, 9 Agustus 2021**	5
		✓ Menjadi "Model korupsi struktural kembali terjadi dalam skandal bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 yang melibatkan penguasa, politikus, dan pengusaha. Kali ini yang **<u>menjadi</u>** terdakwa *adalah* mantan Mensos Juliari Batubara." ***Jawapos.com*, 25 Agustus 2021**	4
		- Relasional Identitas ✓ Adalah "Model korupsi struktural kembali terjadi dalam skandal bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 yang melibatkan penguasa, politikus, dan pengusaha. Kali ini yang menjadi terdakwa **<u>adalah</u>** mantan Mensos Juliari Batubara." ***Jawapos.com*, 25 Agustus 2021**	8
		✓ Merupakan "Perjanjian ini sangat berpengaruh dan komprehensif, **<u>merupakan</u>**	11

		bagian dari perjanjian WTO hasil putaran Uruguay, 1994. Pasal 27-nya memberikan legal basis perlindungan paten di bidang farmasi, termasuk obat-obatan dan vaksin." ***Jawapos.com*, 2 Agustus 2021** - Kepemilikan ✓ Mempunyai "Negara yang tidak **<u>mempunyai</u>** manufacturing capacity juga diperbolehkan melakukan parallel import dari negara lain yang menggunakan lisensi wajib berbasis pada prinsip exhaustion of IP Rights (pasal 6)." ***Jawapos.com*, 2 Agustus 2021** ✓ Memiliki "Bagi negara kekuasaan, penyimpangan dan pelanggaran oleh kelas elite kekuasaan dianggap sesuatu yang biasa karena menilai dirinya yang **<u>memiliki</u>** otoritas kekuasaan." ***Jawapos.com*, 25 Agustus 2021** - Mental Persepsi ✓ Merasa "Betapa pun demikian, peristiwa memalukan ini semestinya tidak membuat pejabat **<u>merasa</u>** amat dipermalukan. Pasalnya, peneliti juga temukan antara klaim dan kenyataan di kalangan –misalnya– personel polisi sehubungan kemampuan mereka mendeteksi	8 4 4 4

		kebohongan." ***Jawapos.com*, 3 Agustus 2021** ✓ Melihat "Reaksi publik pada isu tersebut sebenarnya menjadi gambaran jelas atas perubahan karakter pemilih politik. Jennifer Lee Marshment (2011) telah **<u>melihat</u>** ada pergeseran karakter itu." ***Jawapos.com*, 5 Agustus 2021** - Mental Afeksi ✓ Suka "Reaksi publik pada isu tersebut sebenarnya menjadi gambaran jelas atas perubahan karakter pemilih politik. Jennifer Lee Marshment (2011) telah melihat ada pergeseran karakter itu. Pemilih kini menjadi lebih kritis, mengharap hasil instan, dan lebih **<u>suka</u>** hasil kerja nyata dibandingkan sekadar retorika." ***Jawapos.com*, 5 Agustus 2021** ✓ Mengkhawatirkan-memprihatinkan "Sebagian pihak memanfaatkan agama untuk memecah belah umat demi tujuan sempit, yaitu kekuasaan. Hal ini sungguh **<u>mengkhawatirkan</u>** sekaligus **<u>memprihatinkan</u>** kita semua. Untuk itu, masyarakat seyogianya makin kritis dalam menerima ceramah dari ulama. Kita harus saring mana yang baik dan mana yang buruk substansi ceramah tersebut." ***Jawapos.com*, 10 Agustus**	6 10

		2021 - Mental Kognisi ✓ Berpikir "Mentalitas superior tergambar dari karakter yang mereka miliki, seperti **<u>berpikir</u>** dan bertindak rasional, disiplin, kerja keras, menghargai proses, dan semacamnya." ***Jawapos.com*, 18 Agustus 2021** ✓ Memahami "Kasus ini harus dituntaskan agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Praktik-praktik itulah yang seharusnya dijelaskan sedetail-detailnya supaya masyarakat **<u>memahami</u>**." ***Jawapos.com*, 30 Agustus 2021**	

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "STRUKTUR DAN KAIDAH KEBAHASAAN RUBRIK OPINI MEDIA MASSA *ONLINE JAWAPOS.COM* SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EDITORIAL" Beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 26 April 2022
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
C1D6AJX506132650

Dinda Meliana

RIWAYAT HIDUP

Dinda Meliana lahir di Pulukan, 10 Februari 2000. penulis lahir dari pasangan suami istri Alm. Bapak Mar Ju'i dan Ibu Halimah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 5 Pekutatan, melanjutkan ke jenjang SMP di SMP Negeri 4 Mendoyo, serta ke jenjang SMA di SMA Negeri 1 Negara, dan kini melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Bahasa dan Seni dengan Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Pada awal tahun 2022, Penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul, "Struktur dan Kaidah Kebahasaan Opini pada Media Massa *Online Jawapos.com* serta Relevansinya terhadap Pembelajaran Menulis Teks Editorial". Selanjutnya, mulai awal 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.